

KONSEP KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh:

Devah Sukmawati¹

Nur Komariyah²

Afaf Fitriati³

Umar Gibran Asshiddiqi⁴

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi Penulis: 220721100038@student.trunojoyo.ac.id

***Abstract.** Monetary policy is a crucial aspect in regulating the economic activities of a country, yet the approach to monetary policy in the context of Islamic economics exhibits significant variations compared to conventional approaches. This paper presents the results of research on the concept of monetary policy from the perspective of Islamic economics using a literature review approach. In Islamic economics, Sharia principles such as the prohibition of riba (interest) and emphasis on economic justice influence the regulation of monetary policy. Monetary policy instruments in Islamic economics are more focused on maintaining the circulation of economic resources and developing productive Sharia-compliant economic activities. Various countries such as Sudan, Iran, and Indonesia have diverse practices of Islamic monetary policy, employing instruments such as Reserve Requirement Ratio, Musharaka Certificates, and Islamic Interbank Money Markets.*

***Keywords:** Monetary System, Islamic Economy.*

Abstrak. Kebijakan moneter merupakan aspek krusial dalam mengatur aktivitas ekonomi suatu negara, namun pendekatan terhadap kebijakan moneter dalam konteks ekonomi Islam memiliki variasi yang signifikan dibandingkan dengan pendekatan konvensional.

KONSEP KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang konsep kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan penekanan pada keadilan ekonomi mempengaruhi pengaturan kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam lebih berfokus pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi dan pengembangan usaha-usaha ekonomi syariah yang produktif. Berbagai negara seperti Sudan, Iran, dan Indonesia memiliki praktik kebijakan moneter Islam yang bervariasi, menggunakan instrumen-instrumen seperti *Reserve Requirement Ratio*, *Musharaka Certificates*, dan Pasar Uang Antar Bank Syariah.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Ekonomi Islam.

LATAR BELAKANG

Kebijakan moneter telah menjadi sorotan utama dalam mengatur aktivitas ekonomi suatu negara. Sebagai instrumen yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas mata uang, kebijakan moneter memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Namun, dalam konteks ekonomi Islam, pendekatan terhadap kebijakan moneter mengalami variasi signifikan dibandingkan dengan pendekatan konvensional.

Kebijakan moneter merupakan instrumen bank sentral yang sengaja. Dirancang sedemikian rupa untuk memengaruhi variabel-variabel finansial, seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan memengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan kesempatan. Distribusi, perluasan kerja. Pertumbuhan ekonomi riil yang *optimum* dan stabilitas ekonomi.

Kebijakan moneter ini merupakan faktor penting dalam perekonomian. Namun, perbedaan sistem ekonomi yang berlaku, akan memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan moneter. Sistem ekonomi konvensional memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan moneter dengan sistem ekonomi Islam.

Ekonomi Islam memiliki landasan yang unik dalam menjalankan kebijakan moneter. Prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya, seperti larangan riba dan penekanan

pada keadilan ekonomi, memberikan pandangan yang berbeda dalam merumuskan kebijakan moneter. Dalam tulisan ini, kami akan mengulas konsep kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam dengan lebih mendalam, dengan fokus pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendasarinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk menjelajahi konsep kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan kami untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur terkait dari sumber-sumber terpercaya dalam bidang ekonomi Islam dan kebijakan moneter. Proses penelitian dimulai dengan identifikasi sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, termasuk jurnal akademis, buku teks, dan dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terkait.

Dengan menggabungkan pendekatan studi pustaka dan analisis kritis, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan teori dan praktik dalam bidang ini, serta menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi ekonomi dalam merancang kebijakan moneter yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kebijakan Moneter Islam

Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan, Sistem keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya sistem keuangan pada zaman Rasulullah saw. Di gunakan *bimatalic standard* yaitu emas dan perak (dirham dan dinar) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah saw, ini relatif stabil dengan nilai kurs dirham-dinar 1:10, namun demikian, setabilitas nilai kurs pernah mengalami gangguan karena adanya disequilibrium antara supply dan demand. Misalkan pada masa Bani Umayyah (41/662-132/750) rasio kurs antara dinar-dirham 1:12, sedangkan pada masa Abbasiyah (132/750- 656/1258) berada pada kisaran 1:15.

KONSEP KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Pada masa yang lain nilai tukar dirham-dinar mengalami fluktuasi dengan nilai oaling rendah pada level 1:35-1:50. Instabilitas dalam nilai tukar yang ini akan mengakibatkan terjadinya *bad coins out of circulations* atau kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baik, dalam literatur konvensional peristiwa ini di sebut hukum Gresham. Seperi yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Bany Mamluk (1263-1328), dimana mata uang yang beredar tersebut dari *fulus* (tembaga) mendesak keberadaan uang logam emas dan perak oleh Ibnu Taimiyah di katakana bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang kualitas baik.

Perkembangan emas sebagai standar dari uang beredar mengalami tiga kali evolusi yaitu:

1. *The gold cins standard*: di mana logam emas mulia sebagai uang yang aktif dalam peredaran.
2. *The gold bullion standard* di mana logam emas sebagai para meter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar.
3. *The gold exchange standard (bretton woods system)*: di mana otoritas moneter menentukan nilai tukar *domestic currency* dengan *foreign currency* yang mampu di *back-up* secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki. Dengan perkembangan sistem keuangan yang demikian pesat telah memunculkan uang *fiducier (kredit money)* yaitu uang yang keberadaannya tidak diback-up oleh emas dan perak¹

Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Hampir semua sektor ekonomi kapitalis terkait dengan sistem bunga sehingga sektor moneter lebih cepat berkembang dari pada sektor riil. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan dari pada sektor rill.²

¹Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 177.

²Nur Latifah, *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Modernisasi Vol. 11, No. 2, (2015), hal 124

Definisi lain juga menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara. Kebijakan moneter menurut konvensional merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial, seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang.³

Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang meliputi bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Besaran moneter terdiri atas. Uang primer (M0), uang beredar dalam artian sempit (M1), dan uang beredar dalam artian luas (M2).

Dalam sistem moneter konvensional, instrumen yang dijadikan alat kebijakan moneter pada dasarnya ditunjukkan untuk mengendalikan uang beredar di masyarakat adalah bunga. Sementara dalam Islam tidak memperkenankan instrumen bunga. Eksis di pasar. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Dengan demikian, secara sederhana. Para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat. Dengan begitu, waktu memegang uang oleh setiap pemilik dana akan ditekan seminimal mungkin, di mana waktu tersebut sebenarnya menghambat *velocity*. Dengan kata lain, penyediaan regulasi berupa peluang usaha, produk- produk keuangan syariah serta ketentuan lainnya berkaitan dengan arus uang di masyarakat akan semakin meningkatkan *Velocity* dalam perekonomian.⁴

Pengertian Kebijakan Moneter Islam

Di dalam ekonomi Islam uang bukanlah modal. uang adalah barang khalayak masyarakat luas. Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di sesuatu negara. Sementara modal adalah barang peribadi atan per orang. Jika uang sebagai *flow concept* sementara modal adalah *stock rowept*.

Fokus kebijakan mameter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, di mana ini menjadi inti ekonomi Islam pada semua bentuk

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Kewangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 11

⁴Adhitya Wardhono dan dkk, *Perilaku Kebijakan Bank Sentral* (Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2019), hal.21

KONSEP KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

kebijakan dan ketentuan yang diperkenankan oleh syariah. Dengan demikian dalam Islam, secara sederhana para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan akan produk kenangan syariah yang mampu menyerap “potensi investasi” masyarakat atau kesentian-ketentuan yang merdomng preferensi penggunaan “potensi investasi pada usaha produktif terjadi. Dengan began waktu memegang mang oleh setiap pemilik dana akan ditekan seminimal mangkin di mana waktu tersebut sebenarnya menghambat *velocity*. Dengan kata lain penyediaan regulasi berupa peluang usaha, produk-produk keuangan syariah seta ketentuan lainnya berkenaan dengan arus uang masyarakat akan semakin meningkatkan elocity dalam perekonomian. Dengan demikian perhatian regulasi moneter tidak tertuju pada konsep *money apply* seperti yang dianut konvensional, tapi pada *velocity* perekonomian.⁵

Sementara pengeluaran yang berlebihan dilarang, penimbunan simpanan juga dkecam tegas oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sumber-sumber daya yang telah disediakan Allah harus dipergunakan untuk kegunaan si empunya (dalam batas-hata yang ditetapkan oleh Islam) atau diperuntukan bagi orang lain, sehingga memenuhi tujuan dasar bagi penciptanya. Membiarkan menganggur dan tidak memanfaatkan bagi tujuan-tujuan konsumsi yang benar untuk pengembangan barang-barang umum lewat kaunsteilsusi kesejahteraan (rakat sedekah dan pembayaran semacamnyar mruk investasi produktif, telah dikecam oleh Islam

Prinsip-Prinsip Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam

Secara khusus kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar, yang selanjutnya pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi. Kemudian mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya tingkat harga sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki.

Kebijakan moneter dalam islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi islam sebagai berikut:

1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut.

⁵Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007), hal. 266

2. Manusia merupakan pemimpin (*kholifah*) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung.
4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun.
5. Kekayaan harus diputar.
6. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan.
7. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.⁶

Dalam aspek teknis, kebijakan moneter islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam islam riba yang termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharam ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrument utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Instrumen Moneter Islami

1. Mazhab Pertama (*Iqtishaduna*)

Menurut mazhab *iqtiṣhādūna* tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan dalam penawaran uang (*Ms*). Selain itu kredit tidak mempunyai peran dalam penciptaan uang, karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang saja serta peraturan pemerintah tentang surat peminjaman dan instrumen negosiasi yang dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan sistem kredit dapat menciptakan uang. Sistem yang diterapkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan konsumsi. Tabungan dan investasi telah menciptakan instrumen otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter.

2. Mazhab Kedua (*Mainstream*)

⁶Adawarman Azwat Katin *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta. IIIT, 2001), hal. 28

KONSEP KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Instrumen yang digunakan mazhab kedua untuk mempengaruhi Permintaan Agregat adalah dengan dikenakannya biaya atau pajak atas dana atau aset produktif yang menganggur (*dues of idle fund*). Peningkatan *dues of idle fund* akan mengalihkan permintaan uang yang sedianya ditujukan untuk penimbunan uang/aset yang produktif kepada tujuan uang yang akan meningkatkan produktifitas uang tersebut di sektor riil sehingga investasi meningkat. Peningkatan investasi berdampak pada peningkatan Permintaan Agregat, sehingga keseimbangan umum yang baru akan berada pada tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi. Masyarakat diarahkan untuk mengalokasikan dananya kepada sektor produktif agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi semakin tinggi apabila dana/aset produktif tersebut hanya dibiarkan menganggur.

3. Mazhab Ketiga (Alternatif)

Sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab alternatif adalah syuratiq process yaitu dimana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor riil. Jadi keputusan-keputusan kebijakan moneter yang dituang dalam bentuk instrumen moneter biasanya adalah harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan di sektor riil. Kebijakan di sektor moneter adalah derivasi dari sektor riil dan harmonisasi dengan sektor riil. Secara umum manajemen moneter Islam yang diajukan oleh mazhab ketiga adalah besarnya jumlah penawaran uang mengikuti permintaan uang dari masyarakat. Hal ini agar tidak ada kesenjangan antara sektor riil dan sektor moneter.

Harmonisasi antar sektor riil dan moneter akan menghasilkan suatu kurva jangka panjang dari penawaran uang (M_s) dan permintaan uang (M_d) yang berbentuk seperti jalinan tambang yang harmonis dengan pertumbuhan pendapatan nasional (Y). Jika terjadi peningkatan Permintaan Agregat sebagai akibat dari peningkatan- peningkatan pada konsumsi, atau ekspor bersih (*net export*), atau tingkat investasi atau tingkat belanja pemerintah, maka akan terjadi kenaikan permintaan uang (M_d 1 ke M_d 2) di pasar uang. Responnya otoritas moneter akan meningkatkan penawaran uang dari M_s 1 ke M_s 2 (kebijakan yang harmonis dengan sektor riil). Jika kemudian terjadi lagi peningkatan

permintaan uang (Md), maka otoritas moneter akan merespon hal yang sama yang meningkatkan lagi penawaran uang (Ms).⁷

Dibawah ini terdapat beberapa aplikasi instrumen kebijakan. Moneter diberbagai negara, diantaranya:

1. Sudan

Pada masa sebelum dibelakukannya syariah Islam pada sistem perbankan di Sudan, Bank Sentral Sudan sangat tergantung pada instrumen-instrumen langsung seperti tingkat suku bunga, plafon kredit (*credit ceiling*), ketentuan rasio likuiditas (*tatutory liquidity rano*), dan tingkat diskonto. Pada tahun 1984, setelah diperkenalkan syariah Islam di Sudan. Bank Sentral Sudan mengeluarkan arahan dan perintah kepada seluruh bank-bank yang beroperasi di Sudan agar menjalankan prinsip-prinsip perbankan yang sesuai dengan syariah Islam dalam aktivitas kesehariannya. Akibatnya, Bank Sentral Sudan dihadapkan pada permasalahan substitusi instrumen-instrumen moneter konvensional dengan instrumen yang sesuai dengan syariah Islam untuk dapat mempertahankan perannya sebagai pengawas dan pemberi arahan bagi bank-bank, melakukan ekspansi atau kontraksi penawaran uang atau kredit, dan mengimplementasikan kebijakan moneter, serta sekaligus menjaga kepentingan publik.

Instrumen-instrumen moneter yang digunakan oleh Bank Sentral Sudan dalam operasionalnya adalah sebagai berikut:

- a. Reserve Requirement RR paling kurang disediakan 20% (10% untuk simpanan mata uang asing).
- b. Bank-bank komersial harus mencapai dan memelihara rasio likuiditas sebesar 10% dari dana giro dan tabungan dalam bentuk mata uang lokal.
- c. Plafon kredit untuk sektor-sektor prioritas pada:
 - 1) Pertanian
 - 2) Ekspor
 - 3) Perindustrian
 - 4) Pertambangan dan Energi
 - 5) Transportasi dan Pergudangan

⁷M. Nu Rianto Al Arif. Teori Makro ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis (Bandung Alfabet, 2010), hal. 145

KONSEP KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

- 6) Profesional, Pengrajin, dan Bisnis keluarga ukuran kecil
- 7) Perumahan Rakyat
- 8) Investasi pada pasar saham resmi Khartoum
- d. Marjin keuntungan minimum Murabahah 10%-15%.
- e. Penyertaan minimum nasabah untuk perjanjian Musyarakah sebagai alat untuk mengatur jumlah ketersediaan sumber daya untuk kredit.
- f. Aturan kredit kualitatif dan kuantitatif seperti:
 - 1) Minimum 50% dari kredit diberikan kepada daerah rural.
 - 2) Kredit tidak diberikan kepada orang atau institusi yang gagal sebelumnya.
 - 3) Seluruh kredit harus dipastikan memenuhi ketentuan syariah.
- g. Foreign Exchange Operation sebagai alat Bank Sentral Sudan untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang (bukan untuk fungsi. Kontrol likuiditas).
- h. Open Market Operation dengan menggunakan instrumen:
 - 1) *Central Bank Musharaka Certificate (CMC)*.
 - 2) *Government Musharaka Certificate (GMC)*
- i. Ijara Certificate (Sukuk Sukuk ini merepresentasikan tiga perjanjian dasar:
 - 1) Perjanjian pembelian aset.
 - 2) Perjanjian sewa menyewa.

2. Iran

Iran adalah satu-satunya negara Islam yang menerapkan sistem perekonomian dengan mengacu kepada pemikiran teori ekonomi Islam Mazhab Iqrihaduna, Banyak modifikasi yang dilakukan oleh otoritas moneter Iran terhadap sistem perbankannya agar tetap kompetitif di era persaingan global ini. Berikut instrumen yang dipakai:⁸

- a. *Reserve Requirement Ratio Rasio* cadangan dari 10% sampai 30%, biasanya digunakan untuk menarik dana yang dianggurkan yang secara potensial dapat digunakan dalam peningkatan likuiditas.
- b. *Adjusted Open Market Operations*

⁸*Ibid.* Hal. 147.

- c. *Discount Rates* Karena adanya pelarangan riba, maka instrumen ini tidak digunakan seluas konvensional *Discounting* ini terjadi pada sekuritas yang berdasarkan pada transaksi riil.
- d. *Credit Ceiling*.
- e. *Minimum Expected Profit Ratio of Bank dan Bank's Share Of Profit in Various Contract*

3. Indonesia

Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi bank sentralnya mempunyai instrumen moneter syariah diantaranya

- a. Giro Wajib Minimum. Dalam pelaksanaannya besaran GWM adalah 5% dari pihak ketiga yang berbentuk rupiah dan 3% yang berbentuk mata uang asing.
- b. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (Sertifikat IMA). Sertifikat IMA adalah suatu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyedia dan jangka pendek bagi bank-bank syariah yang kekurangan dana.
- c. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia SWBI (sekarang menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah-SBIS). SWBI adalah instrumen Bank Indonesia (BI) yang sesuai dengan syariah Islam yang digunakan dalam OMO. Selain itu, SWBI ini juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek.
- d. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Sebagai fasilitas bagi bank syariah yang membutuhkan dana di pasar uang, sehingga mereka dapat saling mengadakan perjanjian antar bank syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter dalam ekonomi Islam memiliki beberapa perbedaan signifikan dengan pendekatan konvensional. *Pertama*, dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan

KONSEP KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

penekanan pada keadilan ekonomi mempengaruhi pengaturan kebijakan moneter. Hal ini menyebabkan instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam lebih berfokus pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi dan pengembangan usaha-usaha ekonomi syariah yang produktif. *Kedua*, instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam juga berbeda dengan konvensional karena tidak memperkenankan penggunaan bunga sebagai instrumen utama. Sebaliknya, prinsip bagi hasil menjadi dasar bagi instrumen kebijakan moneter Islam.

Selain itu, penelitian juga mengungkapkan variasi dalam praktik kebijakan moneter Islam di berbagai negara seperti Sudan, Iran, dan Indonesia. Instrumen-instrumen seperti *Reserve Requirement Ratio (RR)*, *Musharaka Certificates*, dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) digunakan dalam menjalankan kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam di negara-negara tersebut.

Saran

Berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari studi ini, terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan untuk pengembangan lebih lanjut dalam konteks kebijakan moneter dalam ekonomi Islam:

1. Pengembangan Instrumen Finansial Syariah

Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan instrumen-instrumen keuangan syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mencapai tujuan ekonomi Islam, seperti pemerataan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Kolaborasi Antar Negara

Negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam dapat menjalin kerja sama dalam mengembangkan standar dan praktik terbaik dalam kebijakan moneter. Kolaborasi semacam ini dapat membantu memperkuat infrastruktur keuangan syariah global dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah.

3. Penguatan Peran Lembaga Keuangan Syariah

Diperlukan upaya untuk memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam perekonomian, termasuk bank syariah dan pasar modal syariah. Hal ini dapat

dilakukan melalui regulasi yang mendukung dan insentif yang memadai untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas sektor keuangan syariah.

4. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Pentingnya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kebijakan moneter yang sesuai. Edukasi yang efektif dapat membantu memperkuat dukungan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Evaluasi Terus-menerus

Perlu dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap implementasi kebijakan moneter dalam ekonomi Islam untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta efektivitas dalam mencapai tujuan ekonomi yang ditetapkan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan dapat tercapai kemajuan yang signifikan dalam pengembangan kebijakan moneter yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam dan berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Al Arif, M. Nur Rianto. (2010). *Teori Makro ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*. Bandung: Alfabet.
- Karim, Adiwarmanto. (2007). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Katin, Adawarman Azwat. (2001). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta.
- Latifah, Nur. (2015). Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Modernisasi*. Vol. 11, No. 2
- Soemitra, Andri. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kkencana
- Sakti, Ali. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing.
- Wardhono, Adhitya dan dkk. (2019). *Perilaku Kebijakan Bank Sentral*. Jawa Timur: Pustaka Abadi.